

Kinerja perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

Rizki Hamdani, Elsy Mayshelly

Universitas Islam Indonesia

e-mail: rizki.hamdani@uii.ac.id, elsyemayshelly15@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of economic capacity, budget governance, and financial performance on people's welfare. In addition, this study also identifies the effect of budget allocation on economic capacity. This research was conducted in the Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY), which consists of four districts and one city. The data used in this study is secondary data originating from the website of BPS DIY Province and DJPK Ministry of Finance. The analytical method used is multiple regression analysis with the help of SmartPLS to examine and process data. Based on the results of hypothesis testing, it is known that economic capacity, budget management, and financial performance have a significant effect on people's welfare. In addition, budget allocation has a significant effect on economic capacity.

Keywords: *budget allocation, economic capacity, budget governance, financial performance, community welfare.*

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art2](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art2)

PENDAHULUAN

Parameter yang penting dalam keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia untuk kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS, 2021c). IPM dapat didefinisikan sebagai suatu alat statistik yang digunakan oleh suatu negara untuk mengukur pencapaian aspek ekonomi maupun sosial secara keseluruhan (Economic Times, 2016). IPM, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan secara signifikan dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat IPM dan rendahnya tingkat pengangguran serta kemiskinan mendasari tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat (Habbe, 2021).

Selain dapat menentukan tingkatan level pembangunan pada suatu wilayah, IPM juga menjadi ukuran kinerja bagaimana pemerintah mengalokasikan dana yang dianggarkan secara bijak dan seoptimal mungkin. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan, yaitu pembangunan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempercepat dalam proses pembangunan. Dengan perekonomian yang baik, pendapatan per kapita pun akan naik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Di dalam perekonomian khususnya daerah, ada beberapa unsur di dalamnya seperti kapasitas ekonomi, tata kelola anggaran daerah, kinerja keuangan daerah, dan lain-lain.

Purbadharmaja et al. (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran untuk pembiayaan pembangunan daerah dapat diatasi melalui tata kelola anggaran. Alokasi anggaran dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan dampak yang nyata bagi kebutuhan masyarakat seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, perekonomian yang masih relatif rendah dapat ditingkatkan melalui peran masyarakat dalam kapasitas perekonomian daerah. Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata di setiap daerah salah satunya disebabkan oleh wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga menimbulkan kesenjangan.

Dalam upaya pemerataan ekonomi, hingga saat ini Pulau Jawa masih mencapai pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi yang paling besar yakni sebesar 58,75% atau lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan sisanya tersebar dalam lima wilayah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta Bali dan Nusa Tenggara (Santoso, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa upaya dari pemerintah masih belum bisa untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang terjadi. Rakhman (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan salah satu faktor pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa yakni pusat

pemerintahan serta ibu kota negara Indonesia yakni Jakarta terletak di Jawa. Bersamaan dengan itu, kota-kota besar yang terletak di Jawa juga lebih dilengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk perkembangan internasional. Tetapi, untuk kegiatan ekonomi terutama pertanian dan eksploitasi sumber daya alam, kota-kota kecil dan menengah jauh lebih cepat karena memainkan peran yang lebih signifikan (Firman, 2004). Namun sampai saat ini, pembangunan nasional terlalu terfokus di Pulau Jawa sehingga terjadi kesenjangan ekonomi maupun pembangunan diantara pulau-pulau lainnya.

Menurut data dari BPS dalam satu dekade terakhir, DKI Jakarta menempati urutan pertama Indeks Pembangunan Manusia menurut provinsi. Berdasarkan level IPM-nya, dari tahun 2010-2020 DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan dan puncaknya pada tahun 2020 mencapai angka 80,77. Semenjak tahun 2017, status IPM DKI Jakarta berada dalam predikat “sangat tinggi” karena melebihi angka 80 dan melebihi rata-rata nasional sebesar 71,94. Capaian ini tidak terlepas bahwa sebagai ibu kota negara, wilayah DKI Jakarta juga berperan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, maupun investasi. Di sisi lain, dalam satu dekade terakhir pula, kualitas pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta semakin membaik yang ditandai dengan level IPM DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada pada peringkat ke-2 setelah DKI. Kendati demikian, pada tahun 2020 IPM DIY berada pada level 79,97 yaitu berkurang 0,02 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dengan level tersebut, DIY memperoleh status IPM dengan predikat tinggi (BPS, 2021a).

Penurunan IPM DIY ini merupakan yang pertama dalam kurun waktu 10 tahun belakang. Parwanto (2021) menjelaskan bahwa indikator pengeluaran per kapita per tahun yang turun di tahun 2020 mengalami kontraksi *minus* 2,63 persen akibat pandemi Covid-19. Namun, secara keseluruhan dari tahun 2010 hingga 2020 rata-rata IPM DIY mengalami kenaikan 0,59 persen per tahunnya dan rata-rata pengeluaran per kapita di DIY mengalami pertumbuhan 1,5 persen per tahun. Apabila IPM DIY dilihat menurut data per kabupaten atau kota, IPM kota Yogyakarta berada pada poin 86,61 (sangat tinggi), Kabupaten Sleman 83,84 (sangat tinggi), Kabupaten Bantul 80,01 (sangat tinggi), Kabupaten Kulonprogo 74,46 (tinggi) dan Gunungkidul 69,98 (sedang).

Kerjasama BPS DIY dan Bappeda DIY (2020) dalam Buku Analisis Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 diungkapkan pertumbuhan ekonomi DIY menunjukkan percepatan selama lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,05 persen dengan sedikit kenaikan dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 4,95 persen, kemudian pada tahun 2017 bertambah menjadi 5,26 persen, lalu di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 6,20 persen dan mencapai 6,60 persen pada tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi DIY periode 2015-2019 juga lebih tinggi dari angka nasional, yaitu pada tahun 2015 sampai 2017 berada sedikit di atasnya sedangkan tahun 2018 dan 2019 selisih 1 hingga 1,5 persen lebih tinggi dari angka nasional. Laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kegiatan ekonomi diyakini akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan.

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir, penduduk miskin Yogyakarta menurun sebesar 101,76 ribu jiwa dengan penurunan tertinggi tercatat pada periode 2015-2016 sebesar 10,05 persen atau setara dengan 55,29 ribu jiwa. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir itu pula, jumlah penduduk miskin secara rata-rata turun sebesar 25,44 ribu orang per tahun. Selama 2015 sampai 2019, angka rasio gini DIY lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia dan sejak tahun 2017 angka rasio gini DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia. Rasio gini merupakan ukuran kesenjangan pendapatan dan kekayaan, sehingga rasio gini yang relatif tinggi di DIY mengindikasikan bahwa ketimpangan masih tinggi di wilayah tersebut. Kondisi yang terjadi juga menunjukkan bahwa belum meratanya hasil pembangunan belum bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat DIY.

Berdasarkan berbagai paparan tersebut, penelitian ini meninjau lebih lanjut mengenai peran perekonomian daerah serta kinerja keuangan pemerintah daerah dalam keberlangsungan kesejahteraan masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan kontrak antara satu orang atau lebih yang berperan sebagai prinsipal dengan orang lain yang bertindak sebagai agen dalam melakukan berbagai layanan dapat

didefinisikan sebagai hubungan keagenan. Di dalamnya, hubungan prinsipal dengan agen yaitu seperti hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai agen dan masyarakat berperan sebagai prinsipal yang digambarkan ketika prinsipal memberikan kewenangan dan sumberdaya kepada agen seperti dalam bentuk memilih seseorang yang berhak mengatur anggaran seperti APBN maupun APBD.

Karena prinsipal tidak mengetahui secara langsung apa saja yang telah dilakukan oleh agen dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan pihak independen yang akan memastikan bahwa yang dilakukan oleh agen adalah benar. Oleh sebab itu, dalam hal ini dibutuhkan peran akuntan sektor publik yang akan menjadi pihak independen mengingat bahwa sebagian laporan yang diberikan oleh agen (pemerintah) adalah informasi keuangan (Abdullah & Halim, 2006a; Santoso & Pambelum, 2008). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dawson et al. (2016) menunjukkan bahwa meskipun diperlukan pemahaman dari berbagai pihak, teori agensi dapat diterapkan pada sektor publik.

Teori Legitimasi

Dowling & Pfeffer (1975) mengemukakan bahwa teori legitimasi didasarkan oleh perikatan sosial antara perusahaan atau organisasi dan masyarakat dengan menggunakan sumber ekonomi. Dowling & Pfeffer (1975) juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan aktivitas organisasi dan memperoleh dukungan dari aktivitas tersebut, harus sesuai dengan norma sosial lingkungan sehingga harapan masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah seperti mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah dapat didukung dengan teori legitimasi. Apabila pemerintah memiliki kinerja yang baik, akan memberikan hasil yang memuaskan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Legitimasi tidak dapat dilepaskan dari pantauan masyarakat lantaran hal itu adalah tempat di mana pemerintah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah akan mengurangi rasa tidak percaya dan timbulnya penyimpangan serta mampu menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat (Novitasari & Prabowo, 2020).

Alokasi Anggaran Daerah

Atkinson et al. (1997) mendefinisikan bahwa anggaran adalah ungkapan kuantitatif dari arus masuk dan keluarnya uang yang menentukan apakah rencana keuangan dari suatu organisasi akan terpenuhi tujuannya. Dalam penelitian ini, indikator alokasi anggaran yang digunakan terkait fungsi pelayanan publik secara umum terdiri dari belanja modal atau pembangunan, belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan yang diperuntukkan serta didistribusikan dalam pembiayaan kegiatan yang hasil, manfaat, serta dampaknya dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kapasitas Ekonomi

Peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dari satu periode dibandingkan periode lainnya dapat dilihat sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (Raisová & Júlia, 2014). Selain menjadikan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi, indikator lain yang dapat diraih dan diwujudkan dari beraneka ragam sektor ekonomi yaitu perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode waktu yang berbeda (Hanum & Sarlia, 2019).

Tata Kelola Anggaran Daerah

Tata kelola anggaran mencakup struktur, proses, dan hukum yang diimplementasikan untuk memastikan apabila sistem penganggaran yang ditetapkan secara berkelanjutan dapat memenuhi tujuannya (Hackbart & Ramsey, 2002; Otalor & Oti, 2020). Dalam aspek akuntabilitas, untuk mengatasi efisiensi alokasi anggaran dalam pembiayaan pembangunan daerah dapat menggunakan tata kelola anggaran. Tingkat penyerapan anggaran dalam pembangunan ditunjukkan dengan indikator SiLPA. Daerah dengan SiLPA yang tinggi menunjukkan tidak optimalnya alokasi anggaran dan mengindikasikan perubahan regulasi atau inkonsistensi regulasi terkait penggunaan APBD (Purbadharmaja et al., 2019).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Egbunike & Okerekeoti (2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan dalam mencapai hasil keuangan yang dirancang dan diukur terhadap *output* yang diinginkan. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan dan digunakan untuk memberikan informasi bagaimana penyusunan kebijakan yang positif bagi masyarakat (Mahmudi, 2019).

Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu parameter kinerja pembangunan di suatu daerah ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang berkualitas salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan serta tingkat pengangguran, pendapatan secara merata, dan tercapainya kesejahteraan masyarakat (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020). Secara signifikan indikator IPM, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan mengukur kesejahteraan masyarakat dengan tanda positif (IPM) dan tanda negatif (pengangguran dan kemiskinan). Hal ini bermakna apabila tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi didasari oleh tingginya tingkat IPM dan rendahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan (Habbe, 2021).

Penelitian Terdahulu

Menurut Sofilda et al. (2015), peningkatan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan IPM tahun 2007-2012 yang dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Hasil regresi berganda dengan data panel menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dipengaruhi secara signifikan oleh pengeluaran barang dan jasa, dan IPM di wilayah Indonesia bagian barat, timur, dan tengah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan per kapita. Sementara itu, peningkatan pendapatan per kapita dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal, barang, dan jasa,

Menurut Adiputra et al. (2017), kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali dipengaruhi secara langsung oleh PAD dan dapat ditingkatkan dengan SiLPA melalui alokasi belanja modal. Selanjutnya, Indramawan (2018) menunjukkan bahwa IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap belanja modal, serta mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas PAD.

Selanjutnya, (Mutiha, 2018) menunjukkan bahwa IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD dan mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap DBH Pajak, DAU, dan DAK. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan PAD mampu meningkatkan IPM sedangkan peningkatan DBH Pajak, DAU, dan DAK akan menurunkan IPM. Kemudian, Purbadharmaja et al. (2019) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi mendorong perekonomian bagi peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Indikator pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dalam alokasi anggaran sejalan dengan peningkatan kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan APBD juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Elia et al. (2020) menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terkait kegiatan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap belanja pemerintah dan berdampak pada pengeluaran pemerintah melalui penyediaan lapangan kerja dan PDRB di delapan kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah.

Habbe (2021) menguji apakah tingkat kesejahteraan di 25 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2009-2014 dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis menggunakan deskriptif dan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis PLS menunjukkan bahwa kinerja otonomi daerah mampu meningkatkan IPM selama satu tahun ke depan dan menurunkan angka kemiskinan dalam dua dan tiga tahun ke depan. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, efektivitas PAD dapat menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Masyarakat, yang berperan sebagai individu sangat membutuhkan pelayanan publik yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Dengan peningkatan alokasi anggaran di berbagai bidang, diharapkan akan mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, indikator yang dianggap penting yaitu PDRB, karena dapat memberikan informasi mengenai ukuran maupun kinerja ekonomi, Kinerja ekonomi yang baik secara nyata mengalokasikan infrastruktur yang merata sehingga mempermudah akses kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Purbadharmaja et al. (2019) bahwa kapasitas perekonomian di Provinsi Bali dapat ditingkatkan melalui alokasi anggaran dalam bidang pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Kemudian tingkat PDRB di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mendorong peningkatan pendapatan per kapita (Elia et al., 2020).

H1: Alokasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas ekonomi

Penelitian oleh Purbadharmaja et al. (2019) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai keterkaitan dengan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas ekonomi akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi di daerah sehingga pendapatan pun akan meningkat. Kesejahteraan ekonomi masyarakat yang mengalami perbaikan mencerminkan kenaikan pendapatan per kapita (Hanum & Sarlia, 2019). Di dalam penelitian Sofilda et al. (2015) menyatakan pertumbuhan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap IPM di wilayah Indonesia bagian barat. Sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa kemiskinan berdampak pada PDRB (Elia et al., 2020).

H2a: PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

H2b: PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H2c: PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran

Indikator SILPA maupun SiLPA digunakan sebagai indikator tata kelola anggaran, karena alokasi anggaran dengan SILPA rendah berarti efektif dalam mengalokasikan anggaran (Dian, 2017). Menurut Adiputra et al. (2017) kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali dapat ditingkatkan dengan SiLPA melalui alokasi belanja modal.

Dalam membangun kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan karena dibutuhkan dana dalam melakukan berbagai program pembangunan. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Purbadharmaja et al., 2019).

H3a: SiLPA berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM

H3b: SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H3c: SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan indikator derajat desentralisasi dan efektivitas PAD. Muliha (2018) mengemukakan bahwa IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD, yang berarti peningkatan PAD mampu meningkatkan IPM provinsi di Indonesia. Kemudian penelitian pada wilayah Papua dan Papua Barat menunjukkan IPM mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas PAD (Indramawan, 2018). Sementara itu, penelitian lainnya menunjukkan kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali dipengaruhi secara langsung oleh PAD (Adiputra et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Habbe (2021) menyatakan dalam dua atau tiga tahun ke depan, efektivitas PAD dapat menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan di 25 kota/kabupaten di Sulawesi Selatan tahun 2009-2014.

H4a: Derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

H4b: Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H4c: Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran

H4d: Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM

H4e: Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

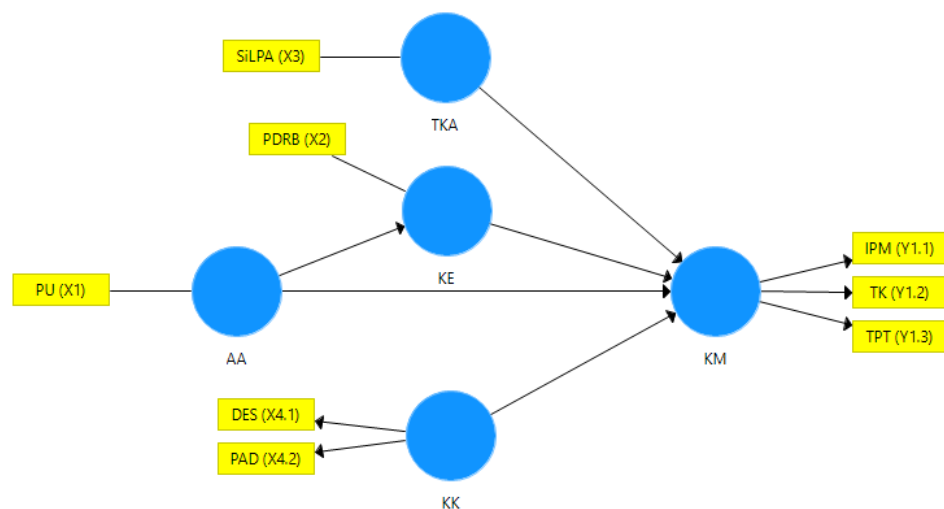
H4f: Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota tahun anggaran 2016-2020. Lokasi ini dipilih karena dalam satu dekade terakhir, DIY mempunyai kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik yaitu ditandai dengan level IPM DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada pada posisi ke-2 setelah ibu kota Negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta (BPS, 2021a). Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi DIY periode 2015-2019 menunjukkan percepatan dan juga lebih tinggi dari angka nasional. Tetapi dalam periode itu pula, angka rasio gini DIY lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia dan sejak tahun 2017 angka rasio gini DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020). Kemudian, sampel penelitian berupa publikasi Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan PDRB per kabupaten/kota di DIY menurut pengeluaran serta data laporan keuangan daerah yaitu mencakup APBD dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh instansi-instansi terkait untuk tujuan tertentu tetapi sangat berguna dalam rangka tujuan penelitian. Data dikumpulkan dalam rentang waktu tahun anggaran 2016-2020 dan diperoleh dari sumber yang relevan yaitu instansi terkait melalui *website* BPS Provinsi DIY (yogyakarta.bps.go.id) dan situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia (djpk.kemenkeu.go.id).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS). Indikator reflektif dan formatif digunakan PLS dalam menganalisis variabel laten yang tidak dapat dilakukan dengan kovarian berdasarkan model persamaan struktural atau *Structural Equation Modelling* (SEM).



Gambar 1. Model analisis dengan PLS.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan analisis, deskripsi, serta gambaran data variabel secara umum. Adapun statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation* dari variabel eksogen alokasi anggaran (AA), kapasitas ekonomi (KE), tata kelola anggaran (TKA), dan kinerja keuangan daerah (KK) dengan indikator rasio belanja efisiensi pelayanan umum (PU), tingkat PDRB, rasio SiLPA, derajat desentralisasi (DES), dan efektivitas PAD serta variabel endogen kesejahteraan masyarakat (KM) dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan (TK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..

Table 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variable	Indicators	n	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
AA	PU (X1)	25	2,00	471,59	114,912	92,353
KE	PDRB (X2)	25	6.580,68	35.286,51	19.375,058	9.022,932
TKA	SILPA (X3)	25	80,00	785,16	251,641	175,167
KK	DES (X4.1)	25	12,06	39,60	23,743	9,556
	PAD (Y4.2)	25	83,46	141,06	110,890	12,999
	IPM (Y1.1)	25	67,82	86,65	78,276	6,214
KM	TK (Y1.2)	25	6,84	20,30	13,090	4,866
	TPT (Y1.3)	25	1,49	9,16	3,422	1,677

Sumber: data sekunder, diolah

Menurut data yang tertera pada Tabel 1, terdapat 25 data pada setiap indikator penelitian yang digunakan untuk sampel penelitian

Penilaian Model Struktural (Uji Goodness of Fit)

Penilaian model struktural atau uji *goodness of fit* bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen, atau dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel alokasi anggaran terhadap kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi, tata kelola anggaran, maupun kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penilaian model struktural menggunakan *R-square* untuk mengukur varians yang dijelaskan pada masing-masing variabel endogen dan nilai *predictive relevance* (Q^2) dengan prosedur *blindfolding* untuk menunjukkan akurasi prediksi dalam penelitian atau seberapa baik nilai observasi yang dilakukan (Sarstedt et al., 2019). Nilai *R-square* maupun *predictive relevance* (Q^2) akan ditunjukkan pada Tabel 2 dan 3.

Table 2. *R-Square*

Variables	R Square	Adjusted R Square
Kesejahteraan Masyarakat	0,953	0,944
Kapasitas Ekonomi	0,119	0,081

Sumber: data sekunder, diolah

Table 3. *Predictive Relevance* (Q^2)

Variables	SSO	SSE	Q^2 (=1-SSE/SSO)
Kesejahteraan Masyarakat	0,953	0,944	0,786
Kapasitas Ekonomi	0,119	0,081	0,095

Sumber: data sekunder, diolah

Dari hasil uji *goodness of fit* dengan menghasilkan nilai R^2 dan Q^2 pada Tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,944 atau 94,4% untuk variabel kesejahteraan masyarakat dan sebesar 0,081 atau 8,1% untuk variabel kapasitas ekonomi. Maka disimpulkan bahwa variabel endogen kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara substansial atau kuat oleh variabel eksogen karena $R^2 > 0,75$ sedangkan untuk variabel endogen kapasitas ekonomi dipengaruhi secara lemah oleh variabel eksogen karena $R^2 < 0,25$.

Selanjutnya, nilai *predictive relevance* (Q^2) menghasilkan angka 0,786 atau 78,6% untuk variabel kesejahteraan masyarakat dan sebesar 0,095 atau 9,5% untuk variabel kapasitas ekonomi. Karena nilai *Q square* > 0 maka dapat dikatakan kedua variabel endogen mempunyai nilai observasi yang baik, yaitu kesejahteraan masyarakat memiliki nilai *predictive relevance kecil* karena $Q^2 > 0$ dan *kapasitas ekonomi* memiliki nilai *predictive relevance besar* karena $Q^2 > 0,5$.

Nilai *predictive relevance kesejahteraan masyarakat* juga menunjukkan bahwa keragaman data yang dijelaskan oleh model adalah 78,6%, atau dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam data sebesar 78,6% dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan sisanya sebesar 21,4% dijelaskan oleh variabel lain (yang tidak terdapat dalam model) dan *error*. Oleh karena itu, model struktural yang dibangun sudah tepat.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan menjalankan prosedur *bootstrapping* dengan *subsamples* 500 dan tingkat signifikansi 0,05 sehingga menghasilkan *original sample* dan *p-value* seperti pada Tabel 4.13. Kriteria yang digunakan untuk melihat adanya hubungan yang signifikan yaitu apabila nilai *p-value* < tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Selanjutnya, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel yaitu menggunakan relevansi bobot indikator pada tabel *original sampel*, bobot mendekati nol menunjukkan hubungan yang lemah, bobot mendekati -1 atau +1 mengindikasikan hubungan yang negatif atau positif yang kuat (Sarstedt et al., 2019). Tabel 4 merupakan hasil uji hipotesis dengan prosedur *bootstrapping*.

Table 4. Hasil Penilaian Uji Hipotesis (*Direct Effects*)

Variable	Indicators	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	P Values
<i>Direct Effects</i>					
AA	PU -> PDRB	0,345	0,362	0,118	0,004
	PU -> IPM	0,105	0,080	0,128	0,414
	PU -> TK	-0,106	-0,089	0,088	0,227
	PU -> TPT	0,009	0,012	0,239	0,971
KE	PDRB -> IPM	0,828	0,834	0,020	0,000
	PDRB -> TK	-0,946	-0,948	0,013	0,000
	PDRB -> TPT	0,606	0,633	0,089	0,000
TKA	SiLPA -> IPM	-0,398	-0,390	0,174	0,022
	SiLPA -> TK	0,426	0,410	0,167	0,011
	SiLPA -> TPT	-0,189	-0,183	0,147	0,201
KK	DES -> IPM	0,960	0,957	0,035	0,000
	DES -> TK	-0,961	-0,962	0,025	0,000
	DES -> TPT	0,722	0,740	0,114	0,000
	PAD -> IPM	-0,161	-0,156	0,058	0,005
	PAD -> TK	0,108	0,106	0,038	0,004
	PAD -> TPT	-0,343	-0,309	0,158	0,030

Sumber: data sekunder, diolah

Table 5. Hasil Penilaian Uji Hipotesis (*Indirect Effects*)

Variable	Indicators	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	P Values
<i>Indirect Effects</i>					
AA	PU -> PDRB -> IPM	0,286	0,302	0,099	0,004
	PU -> PDRB -> TK	-0,326	-0,343	0,112	0,004
	PU -> PDRB -> TPT	0,209	0,231	0,087	0,017

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil regresi menunjukkan nilai beta pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan sebesar 0,225 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,059. Nilai signifikansi > 0,05 berarti hipotesis 1 **ditolak**. Hal ini berarti semakin besar dewan direksi tidak akan meningkatkan kinerja keuangan

perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sulistyowati & Fidiana (2017) yang menyimpulkan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

Hasil regresi menunjukkan nilai beta pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan sebesar 0,386 dan tingkat signifikansinya 0,031. Nilai signifikansi $< 0,05$ berarti hipotesis 2 **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dewan komisaris, maka semakin tinggi kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sulistyowati & Fidiana (2017). Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan dalam kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Sulistyowati & Fidiana (2017) dan Noviawan dan Septiani (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Hasil regresi menunjukkan nilai beta pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan sebesar 0,277 dan tingkat signifikansinya 0,019. Nilai sig $< 0,05$ berarti hipotesis 3 **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen, maka semakin tinggi kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sependapat dengan Noviawan dan Septiani (2013) yang menyimpulkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik. Dengan meningkatnya kualitas pengawasan, kinerja keuangan juga akan meningkat.

Pembahasan Uji Hipotesis

Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kapasitas Ekonomi

Hipotesis pertama dirumuskan bahwa alokasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kapasitas ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4 dapat dibuktikan bahwa alokasi anggaran dalam bidang belanja fungsi pelayanan umum berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi dengan koefisien parameter 0,345 dan *p-value* sebesar 0,004. Artinya, semakin tinggi alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum akan meningkatkan nilai PDRB pada kabupaten dan kota di DIY.

Selama periode anggaran 2016-2020, alokasi fungsi pelayanan umum yang dikelola pemerintah daerah berjalan secara efisien meskipun satu sampai dua kabupaten/kota di DIY terjadi pemborosan anggaran, hal ini sejalan dengan teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa di dalam sektor publik, pemerintah berperan sebagai agen dan masyarakat berperan sebagai prinsipal yang digambarkan masyarakat memilih pemerintah dalam melakukan berbagai layanan dan mengatur anggaran seperti APBD dan bentuk tanggung jawab atas wewenang yang diberikan tersebut yakni Pemerintah Daerah DIY melakukan alokasi anggaran secara efisien.

Fungsi pelayanan umum terdiri atas pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan, pengelolaan jaringan irigasi serta pengairan lainnya, subsidi, pembayaran bunga utang, dan lain-lain (Kemenkeu, 2017) yang diperuntukkan serta didistribusikan dalam pembiayaan kegiatan yang hasil, manfaat, serta dampaknya dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan efisiensi alokasi anggaran oleh pemerintah daerah akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY, kemudian peningkatan ekonomi tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mendorong pendapatan per kapita dan menstimulasi daya beli masyarakat atas barang dan jasa yang berakibat pada kenaikan nilai PDRB yaitu dibuktikan PDRB Provinsi DIY selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbadharmaja et al. (2019) dan Elia et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa kapasitas ekonomi dapat ditingkatkan melalui alokasi anggaran.

Pengaruh Kapasitas Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis kedua dirumuskan bahwa kapasitas ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4 dapat dibuktikan bahwa PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran terbuka sebagai komponen kesejahteraan masyarakat dengan koefisien parameter -0,946, 0,828, dan 0,606 serta nilai *p-value* $< 0,05$. Artinya, PDRB menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan IPM serta tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

Selama lima tahun PDRB Provinsi DIY mengalami peningkatan yang dapat menandakan laju pertumbuhan ekonomi DIY berjalan dengan baik, hal ini juga tidak terlepas dari keberhasilan peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor. Hasil ini sejalan dengan teori agensi bahwa pemerintah yang berperan sebagai agen dalam melaksanakan tugasnya lebih mengarah pada kepentingan bersama sehingga tidak terjadi masalah yang dapat menimbulkan konflik keagenan.

Peningkatan kapasitas perekonomian wilayah DIY dalam menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode berikutnya dapat dilihat sebagai indikator pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi di Provinsi DIY. Pertumbuhan yang berkualitas ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di DIY dengan rata-rata IPM dalam predikat tinggi dengan nilai 78,3. Salah satu ukuran dasar IPM ialah standar hidup yang layak diukur dengan pendapatan per kapita yang sejalan dengan daya beli masyarakat yaitu berkaitan dengan kapasitas ekonomi. Namun, kapasitas ekonomi belum mampu menstabilkan maupun menurunkan angka pengangguran di DIY, yang puncaknya pada tahun 2020 seluruh kabupaten dan kota di DIY mengalami peningkatan pengangguran.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elia et al. (2020), Purbadharmaja et al. (2019) dan Sofilda et al., (2015) yang menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai keterkaitan dengan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas ekonomi akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi di daerah sehingga pendapatan pun akan meningkat.

Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Kapasitas Ekonomi sebagai Variabel Interveing

Pengaruh langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada Tabel 4 dengan tingkat signifikansi 5% adalah alokasi fungsi belanja pelayanan umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran. Sementara itu, pengaruh tidak langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi pada Tabel 5 adalah alokasi fungsi belanja pelayanan umum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran.

Efisiensi alokasi anggaran khususnya belanja fungsi pelayanan umum pada Provinsi DIY memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang merepresentasikan laju pertumbuhan, ukuran, maupun kinerja ekonomi DIY berjalan dengan baik, Kondisi ini meningkatkan angka IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan di DIY, namun belum mampu menurunkan tingkat pengangguran pada lima tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran tidak mampu mempengaruhi secara signifikan kesejahteraan masyarakat tanpa melalui kapasitas ekonomi, yang dinamakan hubungan *full mediation*, akibatnya kapasitas ekonomi berperan penuh sebagai variabel mediasi.

Pengaruh Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis ketiga dirumuskan bahwa tata kelola anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, dapat dibuktikan bahwa SiLPA sebagai indikator tata kelola anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran sebagai komponen kesejahteraan masyarakat, yaitu masing-masing dengan koefisien parameter -0,398, 0,426, dan -0,189. Artinya, SiLPA menurunkan angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan tetapi tidak menurunkan tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

Anggaran mencerminkan bagaimana sektor publik mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran dalam batas yang ditentukan, karena pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bergantung pada implementasi anggaran yang efektif (Hackbart & Ramsey, 2002; Otolor & Oti, 2020). Oleh karena itu, rasio SiLPA digunakan sebagai indikator penyerapan anggaran dalam pembangunan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di DIY. Hasil ini sejalan dengan teori legitimasi menurut Dowling & Pfeffer (1975) bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, apabila

pemerintah berkinerja baik, akan meningkatkan kualitas pekerjaan dan juga memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Tingginya rasio SiLPA selama tahun 2016-2020 pada Provinsi DIY yang rata-ratanya menunjukkan persentase lebih dari 100 mengindikasikan perubahan regulasi APBD dan belum optimalnya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, karena alokasi anggaran yang efektif ditandai dengan SiLPA yang rendah. Kualitas pengelolaan APBD yang tercermin pada rasio SiLPA belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, karena tingginya SiLPA menurunkan angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan, demikian juga tidak menurunkan tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adiputra et al. (2017) dan Purbadharmaja et al. (2019) yang menyatakan bahwa dalam membangun kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan karena dibutuhkan dana dalam melakukan berbagai program pembangunan.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis keempat dirumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, dapat dibuktikan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah signifikan karena mempunyai nilai $p\text{-value} < 0,05$. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran serta negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta negatif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran. Artinya, derajat desentralisasi meningkatkan angka IPM dan pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan, sementara efektivitas PAD menurunkan angka IPM dan pengangguran serta meningkatkan angka kemiskinan di kabupaten dan kota di DIY.

Kinerja keuangan pemerintah daerah digambarkan sebagai suatu hasil yang diraih selama periode anggaran dalam aspek keuangan daerah yang dalam penelitian ini mencakup rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD. Kinerja keuangan tersebut mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai hasil keuangan yang diukur terhadap *output* yang diinginkan, yaitu *output* yang berupa kesejahteraan masyarakat DIY. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yaitu perikatan antara pemerintah dengan masyarakat yang berhubungan dengan sumber ekonomi. Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah harus sesuai dengan norma sosial yang berlaku dan berhak memperoleh dukungan dari masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga harapan dari masyarakat dapat terpenuhi.

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan yang dapat memberikan informasi penyusunan kebijakan yang positif bagi masyarakat. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah derajat desentralisasi. Kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi mengalami peningkatan yang ditandai dengan angka derajat desentralisasi di kabupaten dan kota di DIY secara rata-rata mengalami kenaikan meskipun terjadi penurunan angka di beberapa titik dengan rata-rata keseluruhan wilayah sebesar 23,743. Peran PAD dalam pengelolaan desentralisasi di Provinsi DIY yaitu digambarkan dengan level pencapaian pembangunan manusia dalam predikat IPM tinggi dan mengurangi tingkat kemiskinan, namun belum efektif dalam menurunkan angka pengangguran.

Untuk melihat tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam melangsungkan suatu aktivitas melalui perbandingan pendapatan sebenarnya dengan pendapatan anggaran (Habbe, 2021) digunakan analisis rasio keuangan kedua yakni efektivitas PAD. Melalui hasil perhitungan, secara keseluruhan Pemerintah Daerah DIY mempunyai kemampuan yang efektif dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, dengan rata-rata yang dimiliki rasio efektivitas PAD yakni sebesar 110,89. Melalui pencapaian ini, efektivitas PAD dapat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, tetapi gagal dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka IPM.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indramawan (2018) pada wilayah Papua dan Papua Barat yang mengemukakan IPM mempunyai hubungan yang positif dan

signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal, tetapi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas PAD kemudian Habbe (2021) menyatakan efektivitas PAD dapat menurunkan tingkat pengangguran tetapi gagal meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, penelitian ini belum sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mutiha (2018) pada provinsi di Indonesia dan Adiputra et al. (2017) pada Provinsi Bali yaitu kualitas pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui proses pengujian, dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi anggaran belanja fungsi pelayanan umum akan meningkatkan nilai PDRB pada kabupaten dan kota di DIY. Alokasi anggaran yang baik dalam memberikan pelayanan publik yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan berakibat pada kenaikan kapasitas ekonomi. Selanjutnya, PDRB sebagai indikator kapasitas ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran sebagai komponen kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perekonomian berperan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM namun belum mampu menstabilkan maupun menurunkan angka pengangguran pada kabupaten dan kota di DIY.

SiLPA sebagai indikator tata kelola anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya rasio SiLPA pada kabupaten dan kota di DIY belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, karena tingginya SiLPA menurunkan angka IPM dan meningkatkan tingkat kemiskinan, demikian juga tidak menurunkan tingkat pengangguran.

Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di DIY adalah signifikan, yaitu derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM dan tingkat pengangguran serta negatif terhadap tingkat kemiskinan, sementara PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan serta negatif terhadap IPM dan tingkat pengangguran. Peran PAD dalam mengelola desentralisasi digambarkan dengan IPM dalam predikat tinggi dan penurunan tingkat kemiskinan, namun belum efektif dalam menurunkan angka pengangguran. Berikutnya, efektivitas PAD berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, tetapi gagal dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka IPM.

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel eksogen sebagai aspek kinerja perekonomian dalam mengevaluasi pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang terbatas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penggunaan indikator setiap variabel eksogen hanya terbatas pada satu sampai dua indikator, seperti lima variabel laten dengan total delapan indikator.

Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel dan indikator, seperti belanja fungsi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan agar mempunyai cakupan yang lebih luas dan dapat mempertimbangkan wilayah atau provinsi lain seperti Provinsi Papua yang mempunyai IPM rendah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Selanjutnya, dapat menggunakan analisis rasio keuangan lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio efisiensi PAD dan rasio lainnya. Melakukan pertimbangan aspek lain dari tata kelola anggaran yang baik seperti opini dari BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah juga dapat menjadi pertimbangan di masa yang akan datang. Penelitian ini berimplikasi pada penyelenggaraan desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan dan secara efektif memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu, pertumbuhan maupun kinerja ekonomi DIY menunjukkan hasil yang baik.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, S., & Halim, A. (2006a). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1).

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006b). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemerintahan dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17–32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2168571>
- Adegun, J. A. (2005). *Variables in Educational Research*. Lagos: Premier Publishers.
- Adiputra, I. M. P., Dwiyantari, N. K. D., & Darmada, D. K. (2017). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Bali). 1–34.
- Antara News. (2021). *Jumlah pulau Indonesia kini 17.000*. Diakses pada 23 Oktober 2021, dari <https://www.antaraneews.com/infografik/2387405/jumlah-pulau-indonesia-kini-17000>
- Atkinson, A. A., Banker, R. D., Kaplan, R. S., & Young, S. M. (1997). *Management Accounting* (2nd ed.). Prentice Hall Inc.
- BPS. (2021a). [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2018-2020. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2021b). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Diakses pada 23 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- BPS. (2021c). *Indeks Pembangunan Manusia*. Diakses pada 24 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- BPS DIY. (2020). *Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2019*.
- BPS DIY. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta menurut Pengeluaran 2016-2020. In *Publikasi PDRB*.
- BPS DIY, & Bappeda DIY. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. Tersedia dari <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/publikasi/detail/30-analisis-ketimpangan-pendapatan-diy-2020>
- Callen, T. (2017). Gross Domestic Product: An Economy's All. In *Finance and Development: Economic Concepts Explained* (pp. 14–15). International Monetary Fund.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approach* (4th ed.). Sage Publications.
- Dawson, G. S., Denford, J. S., Williams, C. K., Preston, D., & Desouza, K. C. (2016). An Examination of Effective IT Governance in the Public Sector Using the Legal View of Agency Theory. *Journal of Management Information Systems*, 33(4), 1180–1208. <https://doi.org/10.1080/07421222.2016.1267533>
- Dian. (2017). *Apa Perbedaan SiLPA dan SiLPA*. Diakses pada 17 November 2021, dari <https://blud.co.id/wp/silpa-dan-silpa-apa-perbedaanya/>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Source: The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Economic Times. (2016). *Definition of Human Development Index*. Diakses pada 1 Januari 2022, dari <https://economictimes.indiatimes.com/definition/human-development-index>
- Egbunike, C. F., & Okerekeoti, C. U. (2018). Macroeconomic factors, firm characteristics and financial performance: A study of selected quoted manufacturing firms in Nigeria. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(2), 142–168. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2018-0029>
- Elia, A., Yulianto, Y., Tiawon, H., Sustiyah, S., & Indrajaya, K. (2020). Government expenditure and poverty reduction in the proliferation of new administrative areas of Central Kalimantan,

- Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2.1410>
- Festiani, S. (2015). *Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur*. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nyy3e7-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-pengamat-akibat-ketimpangan-infrastruktur>
- Firman, T. (2004). Demographic and Spatial Patterns of Indonesia's Recent Urbanisation. *Population, Space and Place*, 10(6), 421–434. <https://doi.org/10.1002/psp.339>
- Habbe, A. H. (2021). The exploration of effect of financial performance to the public welfare. *International Journal of Law and Management*, 63(5), 464–478. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0222>
- Hackbart, M., & Ramsey, J. R. (2002). The theory of the public sector budget: An economic perspective. In *Budget theory in the public sector* (pp. 172–187). London: Quorum Books.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. ., & Black, W. C. (1992). *Multivariate Data Analysis: With Readings*. New York: McMillan Publisher.
- Hair, J. F., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. Y. L. (2017). An Updated and Expanded Assessment of PLS-SEM in Information Systems Research. *Industrial Management & Data Systems*.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 84–92.
- Hernández, I. P., & Munoz, J. A. V. (2017). Endogenous growth and economic capacity: Theory and empirical evidence for the NAFTA countries. *PSL Quarterly Review*, 70(282). https://doi.org/10.13133/2037-3643_70.282_2
- Hybels, R. C. (1995). On legitimacy, legitimation, and organizations. *Academy of Management Best Papers Proceedings, August*, 241–246. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.1995.17536509>
- Indramawan, D. (2018). Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. *Symposium Nasional Keuangan*, 23. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/261>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kazerooni, E. A. (2001). Population and sample. *American Journal of Roentgenology*, 177(5), 993–999. <https://doi.org/10.2214/ajr.177.5.1770993>
- Kemenkeu. (2017). Informasi APBN 2017 “APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global.” In *Informasi APBN 2017*.
- Larson, M. G. (2006). Descriptive Statistics and Graphical Displays. *Circulation*, 114(1), 76–81. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.584474>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mieseigha, E. G., & Adeniyi, S. I. (2013). Budget : A Tool for Business Management and Economy Engineering. *Global Business and Economics Research Journal*, 2(10), 1–17. <http://www.journal.globejournal.org>
- Mutiha, A. H. (2018). The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia). *KnE Social Sciences*, 3(11), 609.

<https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2792>

- Nitzl, C. (2016). The Use of Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) in Management Accounting Research: Directions for Future Theory Development. *Journal of Accounting Literature*, 19–35.
- Novitasari, D. R., & Prabowo, T. J. W. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–8.
- Nwankwo, J. I., & Emunemu, B. O. (2014). *Handbook on Research in Education and the Social Sciences*. Ibadan: Giraffe Books.
- Otalor, J. I., & Oti, P. A. (2020). Budgetary Governance and Sustainable Development in Nigeria. *International Journal of Entrepreneurship*, 24(1), 1–21. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/budgetary-governance-sustainable-development/docview/2425599007/se-2?accountid=62100>
- Oyebanji, O. J. A. (2017). Research Variables: Types, Uses, and Definition of Terms. In *Research in Education* (pp. 43–54). His Lineage Publishing House.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Parwanto, D. (2021). *IPM DIY 2020 Tertinggi Kedua se-Indonesia*. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari https://rri.co.id/yogyakarta/565-sosial/957144/ipm-diy-2020-tertinggi-kedua-se-indonesia?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Raisová, M., & Júlia, Ć. (2014). Emerging Markets Queries in Finance And Business Economic growth-supply and demand perspective. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 184–191. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00476-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00476-6)
- Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>
- Rigdon, E. E. (2013). Partial Least Squares Path Modeling. In *Structural Equation Modeling. A Second Course* (2nd ed., pp. 81–116). Charlotte NC: Information Age Publishing.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 14–33. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/363/347>
- Santoso, Y. I. (2021). *Ekonomi 2020 masih terpusat di Pulau Jawa, ini kata ekonom CORE*. Diakses pada 24 Oktober 2021, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-2020-masih-terpusat-di-pulau-jawa-ini-kata-ekonom-core>
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Becker, J.-M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Sarstedt, M., & Mooi, E. A. (2019). *A Concise Guide to Market Research: The Process, Data, and Methods Using IBM SPSS Statistics*. Springer.
- Scott, J., & Marshall, G. (2009). *A Dictionary of Sociology* (3rd ed.). USA: Oxford University Press.
- Setkab. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020; BPS: Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antarpulau*.

Diakses pada 23 Oktober 2021, dari <https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/>

- Sino, S., Ruliana, T., & Latif, I. N. (2016). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. *Ekonomia*, 5(1), 432–438.
- Siregar, H. A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dengan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi. *Kurs*, 2(1), 1–13.
- Sofilda, E., Nurhayati, & Hamzah, M. Z. (2015). Government Spending Contributions on per Capita Income and its Effect toward the Human Development Index (Comparative Study between Western Indonesia and Central & East Indonesia). *Journal of Social and Development Sciences*, 6(3), 43–49. <https://doi.org/10.22610/jsds.v6i3.851>
- Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 111–124. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.284>
- Wulandari, E., Wahyudi, M., & Rani, U. (2018). Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of Regencies/Municipalities in. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(2), 125–137.